



## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Fani Dwi Febriyanti\*, Nyimas Wardatul Afiqoh  
Universitas Muhammadiyah Gresik

\*Correspondensi email : [05fanidwi@gmail.com](mailto:05fanidwi@gmail.com)

### AFILIASI

Akuntansi, Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Wahid  
Hasyim

### \*Korespondensi:

Email :  
[05fanidwi@gmail.com](mailto:05fanidwi@gmail.com)

### DOI:

10.31942/jafin.xxxxxxxxxx

### SEJARAH

#### ARTIKEL

##### Diterima:

28 Februari 2024

##### Direview:

5 Maret 2024

##### Direvisi:

18 Maret 2024

##### Diterbitkan:

31 Maret 2024

### Kantor :

Jurusan Akuntansi,  
Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis  
Universitas Wahid  
Hasyim  
Jl. Menoreh Tengah X/22  
Sampangan, Semarang  
50236  
Central Java, Indonesia.

E-ISSN : 2963-1076

P-ISSN : 2962-9861

### Abstrak

*This study's objective is to determine and look into the potential significant impact of variables such as local government independence, wealth, age, and total regional assets on the mandated disclosure level in the Regional Government Financial Report. In this study, a quantitative method was adopted. Purposive sampling is used in the sampling process, and the sample size consists of 37 regencies and city in the province of East Java. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. The study's findings demonstrate that the degree of required disclosure of local government financial statements is positively and significantly impacted by the total regional asset variable. While the variables of local government independence, local government wealth, and age of local government do not affect the level of mandatory disclosure of local government financial statements.*

**Keywords :** Independence, Wealth, Total assets, Age, Mandatory disclosure.

### Abstrak

Sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang berasal dari sumber daya yang dimilikinya disebut kekayaan pemerintah daerah. Pemerintah dengan PAD besar dapat mendorong warganya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, sehingga akan memotivasi pemerintah untuk mengungkapkan seluruh data keuangannya secara lengkap dan terbuka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan melihat potensi pengaruh signifikan variabel-variabel seperti kemandirian pemerintah daerah, kekayaan, umur, dan total kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan yang diwajibkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini, metode kuantitatif diadopsi. Purposive sampling digunakan dalam proses pengambilan sampel, dan besar sampelnya terdiri dari 37 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel jumlah aset daerah. Sedangkan variabel independensi pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat wajib pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci :** Kemandirian, Kekayaan, Total Harta, Umur, Kewajiban Pengungkapan.

### PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pembangunan, memberikan layanan untuk masyarakat, dan memperluas pemerintahanan daerah merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Sebagai pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan mengelola keuangan publik, pemerintah bertanggungjawab atas transparansi dan akuntabilitas

dalam berbagai situasi, terutama dalam masalah keuangan yang sangat sensitif. Namun ada banyak situasi di mana pemerintah menjadi lebih tanggap terhadap kebutuhan individu dan kelompok, sehingga berujung pada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sesuai hasil pemeriksaan keuangan pemda oleh BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur menyatakan jika pemerintah daerah masih belum memenuhi peraturan pemerintah dalam pembuatan dan penyampaian laporan keuangan daerahnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah diharapkan mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menjadi prosedur untuk mengembangkan serta melaksanakan kebijakan keuangan pemerintah berlandaskan aturan pemerintah No. 71 Tahun 2010. Dengan mematuhi SAP, pemerintah daerah dapat meminimalkan potensi masalah ketidakpatuhan dan dengan demikian mendukung upaya meningkatkan keterbukaan keuangan yang efektif dan efisien di tingkat daerah.

Menurut penelitian (Priharjanto & Wardani, 2017) Dalam laporan keuangan, pengungkapan ada dua macam, yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela dan yang bersifat wajib. Pengungkapan sukarela adalah ketika suatu entitas menyediakan informasi tambahan secara inisiatif dengan tujuan memberikan pengguna laporan keuangan informasi yang lebih lengkap. Sementara itu, pengungkapan wajib adalah informasi yang harus disajikan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku oleh pihak yang berwenang. Terkait laporan keuangan pemerintah, kriteria yang dipertimbangkan adalah minimalnya transparansi yang diamanatkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait dan disusun dalam (PP Nomor 71, 2010). Hal ini diperkuat oleh sejumlah peneliti yang mencatat bahwa tingkat keterbukaan dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih cenderung rendah yaitu, 26,48% (Herawati, 2018), 39,9% (W. Putri & Arza, 2019), 60,42% (Utami & Sulardi, 2020), dan 38,99% (Teriyani et al., 2022). Dengan demikian, memperlihatkan bahwa belum seutuhnya pemerintah daerah memenuhi tanggungjawabnya dalam pelaporan keuangan secara transparan. Sesuai dengan teori agensi, dimana pemerintah harus diawasi untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian peraturan yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Banyak variabel yang mempengaruhi publikasi laporan keuangan daerah. Beberapa faktor diyakini turut mempengaruhi, antara lain umur pemerintahan daerah, jumlah kekayaan dan kemandirian yang dimiliki, serta aset secara keseluruhan.. Meningkatkan tingkat kemandirian daerah dapat membantu mengurangi kesalahan dalam perencanaan dan pelaporan anggaran pemerintah daerah (Herawati, 2018). (Rahim et al., 2020), dan (Finakesti et al., 2022) membuktikan bagaimana tingkat kemandirian pemerintah provinsi mempengaruhi transparansinya. Berbeda dengan (Utami & Sulardi, 2020) menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah tidak berakibat pada keterbukaan informasi ekonomi pemerintah daerah.

Sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang berasal dari sumber daya yang dimilikinya disebut kekayaan pemerintah daerah. (Setyaningrum & Syafitri, 2012) Pemerintah dengan PAD besar dapat mendorong warganya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, sehingga akan memotivasi pemerintah untuk mengungkapkan seluruh data keuangannya secara lengkap dan terbuka. (Kurniawati et al., 2020) dan (Primadiva et al., 2021) tingkat kekayaan pemerintah berdampak pada tingkat keterbukaan laporan keuangan pemerintah daerah.

Aset suatu entitas adalah seluruh sumber daya yang berada di bawah kendalinya untuk melaksanakan tugas operasionalnya. Semakin banyak jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah, maka semakin tinggi risiko pengungkapan keuangan, yang berdampak pada rendahnya

kualitas laporan keuangan (A. N. Putri et al., 2023). Hal ini didukung oleh (Merliani et al., 2018) dan (Haryanto et al., 2023) yang mendapati apabila jumlah aset dan tingkat keterbukaan dalam pelaporan keuangan daerah saling berkaitan.

Umur pemerintah daerah merujuk dari lamanya masa pemerintahan tersebut sudah berjalan. Semakin lama suatu pemerintahan berlangsung, hal tersebut juga akan berdampak pada kualitas dan keterbukaan pelaporan keuangan pemerintah (Widanti, 2019). (Narulitasari & Zafira, 2021) menemukan bahwa umur pemerintah berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, sudut pandang lain berpendapat bahwa usia pemerintah daerah turut serta memberi dampak terhadap tingkat transparansi pengungkapan keuangan (Budiarto & Indarti, 2019).

Oleh karena itu, untuk menggali lebih dalam kebijakan mengenai transparansi pelaporan keuangan pada tingkat kabupaten dan kota. Tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan empat variabel independen untuk memahami aspek mana saja yang mempengaruhi tingkat transparansi. Kemandirian, kekayaan, total aset, dan umur pemerintah daerah merupakan variabel yang diduga memberikan dampak terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020–2022 yang mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dengan rincian 29 kabupaten dan 9 kota yang menjadi sumber data dalam pengamatan ini. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang menurut aturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 ialah pelaporan keuangan yang dimaksud.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Agensi**

Menurut (Scott, 2015) teori keagenan merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mempelajari hubungan dan dinamika antara dua organisasi yang disebut “principal” dan “agent” dalam konteks ini agen yang bertindak atas nama prinsipal. Teori ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan, teori keagenan sering digunakan untuk memahami hubungan antara prinsipal (rakyat) yang memberi perintah dan agen (pemerintah) yang bertugas melaksanakan kebijakan dan rencana pemerintah. Teori keagenan dikembangkan untuk mengatasi permasalahan ketidakcukupan informasi yang sering terjadi ketika prinsipal berinteraksi dengan agen (Widanti, 2019).

Masalah muncul dalam hubungan keagenan ketika hanya satu pihak saja yang mempunyai akses terhadap informasi lebih luas dibandingkan pihak lain. Persoalan utama yang perlu diatasi adalah bagaimana prinsipal dapat memastikan bahwa agen menjalankan tugasnya sesuai dengan target yang telah ditentukan. Laporan keuangan berfungsi sebagai bukti kinerja yang telah dilaporkan agen kepada prinsipal. Dalam situasi ini, prinsipal (rakyat) harus melakukan pengawasan kepada agen sehingga pemerintah daerah terdorong untuk menyampaikan informasi secara transparan dan sesuai dengan peraturan. Dengan adanya informasi tersebut, masyarakat dapat mengevaluasi dan menelusuri efektivitas pemerintah dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan daerah (W. Putri & Arza, 2019).

### **Pengungkapan Wajib LKPD**

Laporan keuangan pemerintah daerah dimaksud untuk membagikan pencerahan kepada pihak terkait mengenai pengelolaan keuangan pemerintah dan sejauh mana sumber daya publik telah dimanfaatkan. Laporan keuangan harus mematuhi semua peraturan yang mengatur pengungkapan informasi keuangan. Pengungkapan (disclosure) dalam arti luas

berarti menyampaikan informasi dalam laporan keuangan, ketika menyampaikan maksud penjelasan yang memadai dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada pemerintahan. Menurut (PP Nomor 71, 2010) Standar Akuntansi Pemerintah ditentukan sebagai landasan pengungkapan informasi keuangan secara lengkap. Segala informasi yang wajib dicantumkan dalam laporan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berjalan disebut pengungkapan wajib (Hendriyani & Tahar, 2015). Dalam konteks laporan keuangan pemerintah, pengungkapan wajib ini mengacu pada penyampaian informasi yang sesuai dengan Standar Akuntansi (SAP).

### **Kemandirian Pemerintah Daerah**

Kemandirian pemerintah daerah mencerminkan tingkat otonomi dan wewenang yang dimiliki suatu daerah dalam mengelola kebijakan dan keuangan pemerintah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. (Finakesti et al., 2022) berpendapat bahwa tingkat kemandirian dapat dilihat dari kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendanai sendiri aktivitas pemerintahannya, termasuk dalam pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian yang tinggi dapat mempengaruhi jumlah informasi yang diungkapkan di website pemerintah daerah sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat. Sebab bila suatu daerah dianggap sebagai daerah yang mandiri dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan, maka daerah itu akan melakukan pengungkapannya dengan baik menjadi wujud transparansinya (Murni et al., 2017). Dengan kata lain, meningkatnya keterbukaan informasi keuangan pemerintah daerah cenderung dipengaruhi tingkat independensi pemerintahan.

### **Kekayaan Pemerintah Daerah**

Kekayaan pemerintah daerah mencakup sumber daya keuangan, aset, dan pendapatan yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah, termasuk pajak daerah, harta kekayaan, dana pemerintah pusat, dan sumber daya lainnya. Tingkat kekayaan daerah mencerminkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mengindikasikan sejauh mana tingkat kejayaan daerah tersebut. Semakin tinggi kekayaan suatu daerah, maka meningkatnya juga partisipasi warga dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah (W. Putri & Arza, 2019). Pemerintah daerah dengan sumber daya keuangan lebih banyak cenderung menerapkan transparansi yang lebih ketat dalam pengelolaan data publik, termasuk pengungkapan informasi keuangan secara menyeluruh.

### **Total Aset Daerah**

Kebijakan pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa aset diartikan sebagai sumber keuangan yang dimiliki oleh pemerintah dan diinginkan dapat berguna di masa depan. Aset ini dapat berupa sumber daya finansial maupun non-finansial yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik serta sumber daya yang dijaga karena peristiwa masa lampau. Pengelolaan aset dapat berdampak pada kesejahteraan dan pelayanan publik yang baik (Teriyani et al., 2022). Kualitas pengungkapan laporan keuangan dapat dipengaruhi total aset yang dipegang oleh pemerintah daerah. Jumlah rincian dan informasi laporan keuangan sebanding dengan jumlah aset yang dimiliki suatu daerah (Haryanto et al., 2023).

### **Umur Pemerintah Daerah**

Umur pemerintah daerah mengacu pada sejak kapan pemerintah daerah tersebut dibentuk atau didirikan. Menurut (Simbolon & Kurniawan, 2018), pemerintah daerah dengan sejarah administrasi yang lebih panjang akan memiliki kelebihan pengetahuan dan sumber daya

yang lebih besar dalam mengelola operasi keuangannya sesuai dengan SAP. Pengungkapan yang lebih baik mungkin akan dilakukan oleh pemerintah daerah yang lebih berpengalaman karena mereka lebih memahami keterbukaan (Widanti, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Sugiono (2019:17) mengartikan penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian yang berdasarkan paradigma positivisme, yang cocok dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan memahami interaksi antar variabel yang diteliti serta melakukan uji hipotesis pada variabel Populasi penelitian adalah laporan hasil pemeriksaan sebanyak 38 kabupaten dan juga kota diwilayah Jawa Timur yang dicek Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode 2020–2022. Sumber data sekunder tersebut diperoleh melalui situs website milik BPK perwakilan Prov. Jawa Timur, yang dapat diakses di <http://jatim.bpk.go.id>.

Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dipilih untuk penentuan sampel dengan mengaplikasikan pendekatan *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kabupaten dan kota yang mengungkapkan LHP atas LKPD selama tahun pengamatan.
2. Selama masa penelitian, kabupaten dan kota mendapat penilaian wajar secara keseluruhan atas pelaporan keuangan dari pemerintah.
3. kabupaten dan kota yang menyediakan data untuk menilai faktor-faktor yang diteliti, antara lain kemandirian, kekayaan, total aset dan umur pemerintahan daerah.

Untuk mengetahui adanya pengaruh dan keterkaitan antar variabel terikat dengan variabel dependen, digunakan pendekatan pengujian regresi linier berganda yang dapat dinyatakan dalam bentuk model sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y= Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

$\alpha$ = Alpha

$\beta_1$ - $\beta_6$ = Koefisien Regresi Variabel Independen

X1= Tingkat Kemandirian Pemerintah

X2= Kekayaan Pemerintah Daerah

X3= Total Aset Daerah

X4= Umur Pemerintah Daerah

$\varepsilon$ = Error Trem

Penelitian ini menggunakan lima variabel diantaranya yaitu kemandirian pemerintah daerah ( $X_1$ ), kekayaan pemerintah daerah ( $X_2$ ), total aset daerah ( $X_3$ ), umur pemerintah daerah ( $X_4$ ), dan pengungkapan wajib LKPD (Y). Pengukuran variabel ini dijabarkan sebagai berikut :

a. Kemandirian Pemerintah Daerah ( $X_1$ )

Tingkat kemandirian mencerminkan derajat ketergantungan pemerintah daerah pada sumber pendanaan eksternal (Finakesti et al., 2022). Pengukuran tingkat kemandirian dapat dilakukan dengan mengevaluasi baik besaran pendapatan transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah kewajiban, seperti yang ditunjukkan sebagai berikut:

$$\text{MANDIRI} = \frac{\text{PAD}}{\text{Tot. Pend. Transfer} + \text{Tot. Kewajiban}}$$

b. Kekayaan Pemerintah Daerah ( $X_2$ )

Kekayaan pemerintah daerah, merupakan penghasilan yang diperoleh pemerintah pada suatu wilayah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat berasal dari berbagai sumber, dan penghitungannya dapat dilakukan dengan metode berikut:

$$\text{PAD} = \text{Tot. Pendapatan Asli Daerah}$$

c. Total Aset Daerah ( $X_3$ )

Aset merupakan sumber daya keuangan yang dipegang oleh suatu pemerintah daerah dan di perkirakan akan bernilai dimasa datang (Noviawati, 2021). Sehingga total aset dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ASET} = \text{Tot. Aset dalam Neraca}$$

d. Umur Pemerintah Daerah ( $X_4$ )

Variabel umur pemerintah provinsi diukur sejak penyusunan undang-undang kabupaten/kota diterbitkan. Untuk mengetahui umur pemerintah daerah, dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AGE} = \text{Umur Pemerintah Daerah}$$

e. Pengungkapan Wajib LKPD ( $Y$ )

Pengukuran tingkat pengungkapan melibatkan kesetaraan antara pengungkapan yang diwajibkan dalam CaLK dengan standar yang telah ditetapkan dalam SAP. Dengan demikian, tingkat pengungkapan wajib LKPD dapat diukur dengan menggunakan sistem skoring pada daftar *checklist* pengungkapan yang dibuat berdasarkan SAP dan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DISC} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item yang harus diungkapkan}}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian adalah LKPD dari kab/kota di Jawa Timur pada TA 2020-2022 yang didapat dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Jumlah akhir data pengamatan yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 91 data LKPD kab/kota seperti tabel berikut.

No.	Kriteria	Jumlah
1	Total kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur	38
2	Kabupaten/kota yang tidak menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2020-2022	0

3	Kabupaten/kota yang tidak memperoleh penilaian WTP terhadap LKPD selama masa penelitian	(1)
4	Kabupaten/kota yang tidak menyediakan statistik untuk menilai faktor-faktor yang diteliti	0
	Jumlah sampel yang memenuhi kriteria	37
	Tahun pengamatan	3
	Data pengamatan	111
	Data <i>outlier</i>	(20)
	Jumlah akhir data pengamatan	91

**Tabel 1**  
**Penentuan Sampel**

## HASIL

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel di bawah ini menampilkan temuan hasil uji analisis statistik deskriptif bahwa sampel penelitian (N) terdiri dari 91 data LKPD, dengan hasil sebagai berikut:

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mandiri	91	11,74	45,91	23,3048	7,84185
PAD	91	25,63	27,38	26,4887	,48150
Aset	91	28,22	30,22	28,9197	,37681
Umur	91	19	1262	524,76	360,404
DISC	91	,29	,88	,5141	,13286
Valid N (listwise)	91				

Sumber : Data diolah, 2023

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif**

### 2. Uji Asumsi Klasik

#### a) Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized residual
N		91
Nominal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,12329537
Most Extreme Differences	Absolute	0,071
	Positive	0,071
	Negative	-0,057
Test Statistic		0,071
Asymp.Sig (2-tailed)		,200

Sumber : Hasil Output SPSS, 2023

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**

Nilai Asymp Sig diperoleh dengan menggunakan hasil uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. *Asymp Sig* senilai 0,200 angka tersebut lebih dari 0,05. Alhasil, sebaran datanya dikatakan terdistribusi secara normal.

b) Uji Multikolinearitas

		Coefficients <sup>a</sup>				Collinierity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
Model							
1	(Constant)	,106	1,154		,092	,927	
	Mandiri	-,001	,002	-,068	-,505	,615	,559 1,788
	PAD	-,113	,058	-,409	-1,961	,053	,230 4,347
	Aset	,119	,056	,338	2,134	,036	,398 2,511
	Umur	-4,696E-5	,000	-,127	-1,071	,287	,707 1,414

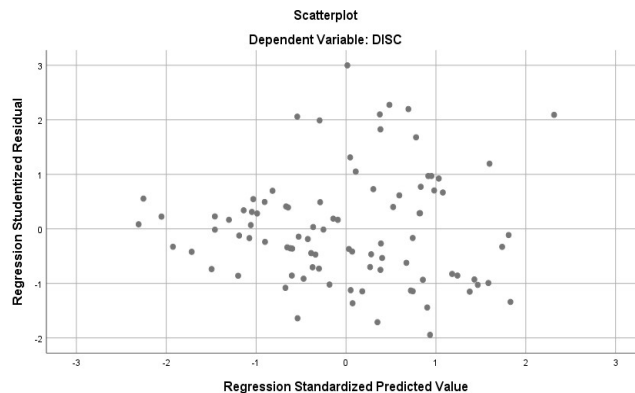
a. Dependent Variable: DISC

Sumber : Hasil Output SPSS, 2023

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Dapat dilihat hasil analisis uji multikolinieritas di atas, terlihat nilai *Tolerance* dari setiap variabel independen yakni Mandiri (0,559), PAD (0,230), Aset (0,398), Umur (0,707) yang melebihi angka 0,100. Selain itu, nilai VIF dari setiap variabel independen yakni Mandiri (1,788), PAD (4,347), Aset (2,511), Umur (1,141) mempunyai nilai tidak melampaui angka 10. Secara ringkas, tidak mempunyai tanda-tanda multikolinearitas pada variabel independen.

c) Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Outlier SPSS, 2023

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Titik-titik sebaran data merata pada sumbu Y di atas 0, tampak pada Gambar 1 grafik scatterplot yang menunjukkan bahwa polanya tidak jelas dan tidak bertemu pada satu sisi saja. Dengan demikian model regresi jelas tidak terdapat bukti heteroskedastisitas.

d) Uji Auto Korelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,373 <sup>a</sup>	,139	,099	,12613	1,033

a. Predictors: (Constant), Umur, Mandiri, Aset, PAD  
b. Dependent Variable: DISC

Sumber : Data Output SPSS, 2023

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Auto Korelasi**

Berdasarkan temuan uji autokorelasi Tabel 5, nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,033 memenuhi parameter yang diperlukan. Nilai DW yang diperoleh adalah -2 hingga +2, sehingga gejala autokorelasi pada model regresi linier tidak ditemukan pada penelitian ini.

**3. Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,106	1,154		,092	,927
	Mandiri	-,001	,002	-,068	-,505	,615
	PAD	-,113	,058	-,409	-1,961	,053
	Aset	,119	,056	,338	2,134	,036
	Umur	-4,696E-5	,000	-,127	-1,071	,287

a. Dependent Variable: DISC

Sumber : Data Output SPSS, 2023

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Dapat dilihat pada Tabel 6 menunjukkan hasil hubungan model regresi linier berganda adalah sebagai berikut : Pengungkapan LKPD (DISC) = 0,106 – 0,001 Mandiri – 0,113 PAD + 0,119 Aset – 4,696 Umur + ε

**4. Uji Hipotesis**

a) Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,373 <sup>a</sup>	,139	,099	,12613	1,033

a. Predictors: (Constant), Umur, Mandiri, Aset, PAD

b. Dependent Variable: DISC

Sumber : Data Output SPSS, 2023

**Tabel 7**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Tabel 7 menampilkan hasil Adjusted R Square yang menghasilkan 0,099. Hal ini menunjukkan bahwa 9,9% varians variabel wajib pengungkapan LKPD dapat dijelaskan oleh variabel independen. Faktor penjelas lain dari pengamatan ini menyumbang 90,1% sisanya.

b) Uji Statistik F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,220	4	,055	3,464	,011 <sup>b</sup>
	Residual	1,368	86	,016		
	Total	1,589	90			

a. Dependent Variable: DISC

b. Predictors: (Constant), Umur, Mandiri, Aset, PAD

Sumber : Data Output SPSS, 2023

**Tabel 8**

**Hasil Uji Statistik F**

Pada Tabel 8, hasil uji statistik F diperoleh Fhitung pada angka 3,468 dengan tingkat sig. 0,011. Pengujian ini dapat diperoleh dengan membandingkan Fhitung terhadap Ftabel. Untuk menentukan F tabel ialah dengan menghitung derajat kebebasan  $df_1 = K - 1$ , di mana K merupakan total variabel. Selanjutnya,  $df_2$  dihitung sebagai  $N - K$ , di mana N adalah banyaknya sampel penelitian. Dalam hal ini,  $df_1$  bernilai 4 dan  $df_2$  bernilai 86. Nilai F tabel yang diperoleh adalah  $2,48 < F$  hitung dengan nilai sig.  $< 0,05$ . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor-faktor independen.

c) Uji Parsial (Uji T)

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Toleranc e	VIF
	B	Std. Error	Beta	t			
1 (Constant)	,106	1,154		,092	,927		
Mandiri	-,001	,002	-,068	-,505	,615	,559	1,788
PAD	-,113	,058	-,409	-1,961	,053	,230	4,347
Aset	,119	,056	,338	2,134	,036	,398	2,511
Umur	-4,696E-5	,000	-,127	-1,071	,287	,707	1,414

a. Dependent Variable: DISC

Sumber : Data Output SPSS, 2023

**Tabel 9**

**Hasil Uji Statistik T**

Nilai t yang dihitung setiap variabel ditampilkan sesuai Tabel 9 dihasilkan nilai t tabel sebesar 1,988. Dengan nilai signifikan 0,615, maka  $H_0$  diterima sedangkan  $H_1$  ditolak pada variabel kemandirian pemerintah daerah ( $X_1$ ) karena nilai t hitung yang diperoleh  $-0,505 < t$  tabel 1,988. Secara ringkas, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengungkapan LKPD yang diwajibkan dengan variabel independensi pemerintah daerah.

Dengan nilai signifikansi 0,053, maka  $H_0$  diterima sedangkan  $H_2$  ditolak pada variabel kekayaan pemerintah daerah ( $X_2$ ) karena nilai t hitung yang diperoleh  $-1,961 < t$  tabel 1,988. Secara ringkas, tingkat pengungkapan LKPD tidak dipengaruhi oleh variabel kekayaan pemerintah daerah.

Dengan nilai signifikansi 0,036, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  disetujui karena nilai t hitung sebesar  $2,134 > t$  tabel 1,988 untuk variabel total aset daerah ( $X_3$ ). Secara ringkas, tingkat pengungkapan yang diwajibkan dalam LKPD dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel total aset daerah.

Dengan nilai signifikansi 0,287, maka  $H_0$  disetujui dan  $H_1$  ditolak karena untuk variabel umur pemerintah daerah ( $X_4$ ) nilai t hitung  $-1,071 < t$  tabel 1,988. Secara ringkas, tingkat transparansi LKPD yang diwajibkan tidak dipengaruhi oleh variabel umur pemerintah daerah.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Kemandirian Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD**

Setelah dilakukan pengujian  $H_1$  diperoleh signifikansi senilai  $0,615 > 0,05$ . Keadaan tersebut menunjukkan bahwa independensi pemerintah daerah tidak berdampak pada sejauh mana kewajiban pengungkapan laporan keuangan. Karena  $H_1$  ditolak dalam penyelidikan ini, hipotesis pertama tidak dapat diverifikasi. Penelitian ini bertolak belakang dengan teori, secara teoritis semakin tinggi tingkat kemandirian pemerintah daerah maka semakin mampu pemerintah melaksanakan tanggungjawabnya dalam menyajikan laporan keuangannya secara transparan kepada masyarakat. Namun jika dilihat dari kenyataannya, rasa tanggungjawab dan kemandirian pemerintah daerah sebagai pelaksana kerja tidak dapat menjamin suatu pemerintah daerah akan menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangannya secara transparan kepada masyarakat sebagai pemberi kerja. Hal ini disebabkan karena semakin besar kemandirian pemerintah daerah artinya PAD yang diperoleh juga lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pendapatan transfer dan kewajiban, sehingga lebih mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, tanpa bergantung pada pembiayaan dari pihak eksternal.

### **Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis kedua yang mempunyai nilai signifikansi  $0,053 > 0,05$  menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap derajat keterbukaan LKPD. Akibatnya, hipotesis kedua ( $H_2$ ) terbantahkan dalam penyelidikan kami. Penelitian ini membantah teori keagenan yang menyatakan bahwa kekayaan suatu entitas adalah PAD yang berasal dari pajak dan retribusi daerah seharusnya meningkatkan kinerja agen (pemerintah daerah) untuk menyampaikan data secara transparan. Dalam hal ini masyarakat diharapkan memenuhi kewajibannya membayar pajak dan bea daerah. Namun kenyataannya, pemerintah daerah dengan PAD yang lebih tidak ikut serta mengajak pemerintah daerah dalam

menjalankan tanggungjawabnya yakni menyajikan laporan keuangan secara transparan. Hal ini disebabkan adanya masyarakat yang kurang memahami laporan keuangan karena hanya masyarakat tertentu saja yang memahami. Sehingga kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah tidak mampu mendorong pemerintah agar lebih teliti dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangannya.

### **Pengaruh Total Aset Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil hipotesis ketiga menunjukkan bahwa dengan angka signifikansi  $0,036 < 0,05$  maka jumlah aset daerah menunjukkan arah yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap derajat keterbukaan LKPD. Berdasarkan fakta yang ada, hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima karena  $H_0$  tidak dapat dibuktikan. Menurut teori keagenan yang berpandangan bahwa pemerintah daerah menanggung atas sumber daya yang ada di daerahnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya kepada pelaku mengenai keterbukaan informasi publik. Semakin banyak total aset yang dipegang, semakin tinggi pula kebutuhan pemerintah suatu daerah untuk menyampaikan laporan keuangan secara transparan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan apa yang dilakukannya. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebagai pelaksana kerja mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menyajikan keterbukaan laporan keuangan guna menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat.

### **Pengaruh Umur Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis keempat penelitian yang mendapati bahwa umur pemerintahan daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, dengan memiliki nilai sig. sebesar 0,287 atau terletak di atas ambang batas 0,05. Akibatnya, hipotesis keempat ( $H_4$ ) terbantahkan dalam penyelidikan kami. Studi ini berangkat dari teori keagenan terapan, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memperoleh pengalaman seiring dengan lamanya masa jabatan. dalam penyajian laporan keuangan kepada publik. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah masih menerapkan pengalaman yang sama dari tahun ketahun sehingga pengungkapan yang disajikan kepada prinsipal monoton dan tidak berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pemerintah cenderung masih menyamakan isi laporan keuangan dengan tahun-tahun sebelumnya karena dianggap sudah sesuai dengan PSAP.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Tujuan pengamatan yang dilakukan ini adalah untuk menguji apakah kekayaan, umur, kemandirian, dan total aset pemerintah daerah mempengaruhi seberapa besar tingkat pengungkapan LKPD yang wajib dilakukan. Data observasi berupa Laporan Hasil Pemeriksaan dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur pada anggaran 2020–2022 berjumlah 91 data yang menjadi subjek utama penelitian ini. Besaran pengungkapan yang diwajibkan LKPD tidak termotivasi secara signifikan oleh kekayaan, umur, dan kemandirian pemerintah daerah. Sementara itu, besarnya tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh total aset pemerintah daerah.

Penelitian yang selanjutnya diharapkan mampu menyelidiki secara lebih rinci dengan menambah variabel lain untuk memperkaya analisis dan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi transparansi laporan keuangan pemerintah. Adapun dalam penelitian

tersebut juga diharapkan untuk memperpanjang periode pengamatan dan memperbanyak sampel yang mencakup provinsi-provinsi lain di Indonesia atau bahkan seluruh Indonesia sehingga dapat mencerminkan kondisi pemerintah daerah yang lebih akurat.

#### DAFTAR REFERENSI

- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Riset Pada Kabupaten Di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1).
- Chairani, A., Tertiarto, W., & Rela, S. (2021). Factors Affecting Disclosure Of Financial Statements On Local Government Websites In Indonesia. *Eurasia: Economics & Business*, 1(43), 1(January), 128–137.
- Finakesti, L., Aprianti, S., Yulina, B., & Hartaty, S. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(1), 71–80.
- Haryanto, Novika, O. D., Kawedar, W., & Rahardjo, S. N. (2023). Karakteristik dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10, 10–15.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 53(9), 1689–1699.
- Herawati. (2018). Pengaruh Karakteristik dan Kompleksitas terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan. 8(5), 55.
- Kurniawati, D., Sarwono, A. E., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 237–248. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i3.4432>
- Merliani, M., Amin, M., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jra*, 07(10), 37–51.
- Murni, A., Rahayu, S., & Zultilisna, D. (2017). Opini Audit, Tingkat Kemandirian, Dan Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 94–103. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.584>
- Narulitasari, D., & Zafira, R. (2021). Determinant of Internet Financial Reporting Disclosure. *Islamic Accounting Journal*, 1(2), 15–27. <http://journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/iaj>
- Noviawati, F. (2021). Analisis Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- PP Nomor 71. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.
- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2017). Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. 1, 97–110.
- Primadiva, P. P., Rosdini, D., & Mulyani, S. (2021). Pengaruh tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 299–310. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i2.11999>
- Putri, A. N., Hardiningsih, P., Akuntansi, P. S., & Semarang, U. S. (2023). Kesesuaian Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Dengan Pengungkapan Laporan Keuangan. 12(1), 62–71.

- Putri, W., & Arza, F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1111–1130. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.131>
- Rahim, S., Ahmad, H., Muslim, M., & Nursadirah, A. (2020). Disclosure of Local Government Financial Statements in South Sulawesi. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 456(Bicmst), 1–6.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). Pearson Education Person.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170.
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia. *Modus*, 30(1), 54–70.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Teriyani, T., Respati, N. W., & Fatimah, F. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 108. <https://doi.org/10.37253/gfa.v6i1.6534>
- Utami, S. R., & Sulardi, S. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 253. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i2.436>
- Widanti, R. Y. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. 8(5), 55.